

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Dalam rangka pembangunan bangsa dibutuhkan modal manusia yang memenuhi kualifikasi keterampilan, pengetahuan dan kompetensi pada berbagai bidang keahlian. Maka diperlukan tolak ukur yang digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia, hal ini mendasari adanya ukuran yang ditetapkan oleh *United Nation Development Programme (1990)* dalam teori Indeks Pembangunan Manusia yaitu suatu pendekatan yang digunakan sebagai tolak ukur tinggi rendahnya pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk mengukur seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari upaya peningkatan kemampuan modal dasar manusia. Pembangunan Manusia merupakan komponen pembangunan melalui pemberdayaan penduduk yang menitikberatkan pada peningkatan dasar manusia. Pembangunan yang dihitung menggunakan ukuran besar kecilnya angka pendidikan, kesehatan dan daya beli. Semakin tinggi angka yang diperoleh maka semakin tercapai tujuan dari pembangunan. Pembangunan merupakan sebuah proses untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik (Nur Baeti, 2013).

Keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai dari seberapa besar permasalahan yang dapat diatasi terlebih lagi permasalahan yang paling mendasar. Permasalahan yang ada diantaranya berupa masalah kemiskinan, pengangguran, pendidikan yang tidak menyeluruh dan masalah keberhasilan pembangunan

manusia dari aspek ekonomi lainnya. Tercapainya tujuan pembangunan yang tercermin pada indeks pembangunan manusia sangat tergantung pemerintah sebagai penyedia sarana penunjang (Marisca dan Haryadi, 2016). Dalam proses mencapai tujuan pembangunan, ada empat komponen yang harus diperhatikan dalam pembangunan manusia (UNDP, 1995). Empat komponen tersebut dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

1. Produktivitas

Manusia harus berupaya meningkatkan produktivitas serta berpartisipasi secara penuh dalam menghasilkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan hidup. Maka dari itu pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai bagian dari pembangunan manusia.

2. Pemerataan

Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses sumber daya ekonomi dan sosial politik. Segala hambatan yang dapat mencegah untuk memperoleh akses tersebut harus dihilangkan, karena semua orang harus dapat peluang berpartisipasi dalam mengambil manfaat yang ada dalam rangka meningkatkan kualitas hidup.

3. Kestinambungan

Akses terhadap kesempatan atau peluang yang tersedia harus dipastikan tidak hanya dinikmati oleh generasi sekarang tetapi juga disiapkan untuk generasi mendatang. Segala sumber daya harus senantiasa dapat diperbarui.

4. Pemberdayaan

Semua orang diharapkan dapat berpartisipasi secara penuh dalam menentukan arah kehidupan mereka. Sama halnya dalam memanfaatkan proses pembangunan maka harus berpartisipasi dalam mengambil keputusan.

Konsep pembangunan manusia sebenarnya tidak berhenti pada keempat komponen diatas. Terdapat beberapa konsep pembangunan sumber daya yang dalam konteks makro merupakan keseluruhan dari proses aktivitas peningkatan kemampuan manusia yang didalamnya mencakup berbagai aktivitas, yaitu: pengembangan pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan gizi, kesempatan kerja, lingkungan hidup yang sehat, pengembangan ditempat kerja, serta kehidupan politik yang bebas (UNDP, 2001 dalam Sulaiman, 2012).

Pertumbuhan dan pembangunan sumber daya manusia harus selalu diupayakan oleh pemerintah guna mempersiapkan generasi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimana permasalahan yang paling mendasar dalam pembangunan ini berada dalam peningkatan kemampuan dasar masyarakat baik secara fisik maupun non fisik (mental dan spiritual). Dalam hal ini pembangunan manusia menitikberatkan peningkatan kualitas hidup yang dilihat dari tiga aspek, yaitu: aspek kesehatan, yang diukur berdasarkan besar-kecilnya angka harapan hidup saat lahir, aspek pendidikan yang diukur berdasarkan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dan aspek daya beli yang diukur berdasarkan nilai pengeluaran per kapita.

Berdasarkan kecenderungan yang lebih besar terhadap kebutuhan dasar dari konsep pembangunan sumber daya manusia, maka perlu penanganan yang

intensif oleh pemerintah dalam pengelolaanya. Dilihat dari keterkaitan ketiga aspek tersebut terhadap aspek lainnya, menunjukkan bahwa taraf baik dalam penanganan ketiga aspek tersebut, secara signifikan memberikan taraf baik terhadap pembangunan ekonomi maupun sosial politik. Artinya, dengan menfokuskan pembangunan sumber daya manusia dalam aspek kesehatan, pendidikan dan kemampuan daya beli masyarakat, mampu memberikan dampak positif terhadap aspek lainnya.

Peranan pembentukan modal manusia sering dikaitkan dengan investasi membangun bangsa. Proses menyiapkan sumber daya yang berkualitas, mempunyai keahlian, produktif dan inovatif sangat penting bagi suatu negara dalam meningkatkan ketahanan nasional. Ketahanan tersebut dilihat dari seberapa besar keberhasilan pembangunan dalam pemerintahan, perekonomian hingga ilmu pengetahuan dan teknologi.

Komponen Pembangunan Manusia

Lembaga UNDP (*United Nations Development Program*) telah mempublikasikan laporan pembangunan sumber daya manusia yang disebut HDI (*Human Development Index*) dalam bentuk kuantitatif. HDI merupakan tolak ukur yang dirumuskan secara konstan dalam pembangunan sumber daya manusia, sehingga gambaran pembangunan tidak akan ditangkap secara sempurna. Terdapat tiga Indikator yang digunakan untuk mengukur HDI, yaitu (*UNDP, Human Development Report, 1993*) :

1. Indeks Harapan Hidup (*longevity*)

Pengukuran dengan indikator penghitungan harapan hidup saat lahir (*life expectancy of birth*) dan angka kematian bayi per seribu penduduk (*infant mortality rate*).

2. Indeks pendidikan (*educational achievement*)

Pengukuran dengan dua indikator, yaitu angka melek huruf pada usia 15 tahun keatas (*adult literacy rate*) dan angka banyaknya penduduk tahun rata-rata usia 25 tahun keatas yang masih bersekolah (*the mean years of schooling*).

3. Indeks hidup layak (*access to resource*)

Pengukuran dengan menggunakan angka pengeluaran riil perkapita. Sejak tahun 2014 di Indonesia mengalami perubahan dalam perhitungan IPM (Indeks Pembangunan Manusia), namun secara umum metode perhitungan pembangunan manusia sama dengan yang digunakan UNDP, yaitu. (BPS, Indeks Pembangunan Manusia, 2014).

1. Indeks Kesehatan

Angka harapan hidup saat lahir dapat diketahui melalui rata-rata angka kelahiran dan kematian per tahun, perbandingan variabel tersebut diharapkan dapat mencerminkan rata-rata lama hidup yang diharapkan masyarakat dalam suatu wilayah. Besarnya nilai maksimum dan minimum untuk menghitung kesehatan telah disepakati oleh semua negara. Batas angka tertinggi menghitung komponen ini adalah 85 tahun dan terendah pada angka 20 tahun. Angka ini telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan UNDP.

2. Indeks Pendidikan

Perhitungan indeks ini berdasarkan dua indikator yaitu, Harapan Lama Sekolah (*Expected years of schooling*) dan Rata- Rata Lama Sekolah (*Mean Years Schooling*). Angka Harapan Lama Sekolah di artikan sebagai harapan yang dapat di tempuh oleh anak.

Angka harapan lama sekolah di hitung pada anak yang usia 7 tahun keatas. Langkah perhitungan RLS dengan menghitung banyaknya penduduk yang menurut umur 7 tahun keatas, kemudian menghitung banyaknya penduduk yang masih sekolah menurut umur 7 tahun keatas. Setelah itu, menghitung rasio penduduk masih sekolah menurut umur 7 tahun keatas dan menghitung harapan lama sekolah. Dengan menjumlahkan formula sebagai berikut :

$$EYSta = \sum_t^n = a \times \frac{Eti}{pti}$$

Di mana : EYSta : Harapan lama sekolah pada umur α di tahun t

E_i^t : Jumlah penduduk usia i yang ber sekolah pada tahun t

P_i^t : Jumlah penduduk usia i pada tahun t

i : Usia (a, a+1, ..., n)

Sedangkan untuk penghitungan Rata-Rata Lama Sekolah menggunakan cara penyelesaian penduduk usia 25 tahun keatas dan mengelompokkan jenjang pendidikan yang sedang di tempuh atau telah ditempuh. Dalam menghitung angka nilai pendidikan, terdapat batasan yang telah di sepakati oleh beberapa negara. Batas maksimum untuk untuk Angka Harapan Lama Sekolah adalah 18

tahun dengan batas minimum 0 tahun. Sementara untuk Rata-rata Lama Sekolah adalah 15 tahun untuk batas maksimum dan 0 tahun untuk batas minimum.

Setelah mendapatkan nilai dari Angka Harapan Lama Sekolah dengan Rata-Rata Lama Sekolah, maka Pendidikan dihitung menggunakan rumus berikut:

$$I_{pendidikan} = \frac{RLS + HLS}{2}$$

Dengan dua indikator ini diharapkan dapat mencerminkan tingkat kemampuan pengetahuan yang ada di setiap wilayah.

3. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita dapat dapat mencerminkan daya beli masyarakat. Pengukuran daya beli masyarakat kabupaten/kota, menggunakan rata-rata konsumsi yang dianggap paling dominan dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang telah di standarkan agar dapat digunakan sebagai perbandingan antar daerah dan waktu sesuai indeks daya beli (Purchasing Power Parity – PPP). Terdapat 96 komoditi yang dipilih, terdiri dari 66 komoditi adalah jenis makanan sedangkan 30 komoditi lainnya adalah jenis non makanan. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli (PPP) menggunakan metode Rao. Untuk menghitung rata-rata pengeluaran per kapita riil yang telah disesuaikan dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: (Analisis Pembangunan Manusia, 2016).

1. Menghitung rupiah yang dikeluarkan(value) dan jumlah barang yang dikonsumsi(quantity) 96 komoditas PPP dari data SUSENAS Modul

Konsumsi.

2. Menghitung quantity komoditi perumahan dari data Susenas Kor.
3. Menghitung harga rata-rata setiap komoditas. Harga yang tidak dapat diperoleh dari Susenas modul konsumsi diproksi dengan harga dari Indeks Harga Konsumen (IHK).
4. Menghitung relatif harga terhadap Kabupaten/Kota .
5. Menghitung penyesuaian PPP (rupiah) atau rata-rata konsumsi riil dengan menggunakan formula :

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{P_{ij}}{P_{ik}} \right)^{1/m}$$

Dimana :

$P(ij)$: Harga Komoditas i di Kabupaten/kota j

$P(ik)$: Harga komoditas i di Kabupaten/Kota

M : Jumlah Komoditas

Atau bisa juga dengan menggunakan Rumus Pengeluaran.

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - (\ln \text{Pengeluaran})}{\ln(\text{pengeluaran maks}) - (\ln \text{pengeluaran maks})}$$

Perkembangan pembangunan manusia dapat dipengaruhi oleh faktor internal manusia itu sendiri, selain kesehatan pembangunan manusia juga dipengaruhi oleh pendidikan sebagai penunjang manusia mencari objek membangun perekonomian agar dapat membangun kehidupan menjadi lebih baik. Selain itu perlu adanya perkembangan dalam daya beli sehingga dapat memajukan perekonomian.

Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia

Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia menyangkup tiga indikator yang telah di sepakati oleh UNDP, berupa:

1. Indeks Kesehatan yang dilihat dari angka harapan hidup pada saat lahir.
2. Indeks pendidikan, dilihat dari harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.
3. Indeks daya beli, dilihat dengan nilai pengeluaran per kapita.

Setiap Komponen IPM distandarisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

Dimensi Kesehatan :

$$I_{\text{Kesehatan}} = \frac{AHN - AHN_{\min}}{AHN_{\max} - HLS_{\min}}$$

Dimensi Pendidikan

$$I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$$

$$I_{\text{RLS}} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$$

$$I_{\text{Pendidikan}} = \frac{RLS + HLS}{2}$$

Dimensi Pengeluaran

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{In(pengeluaran) - (In Pengeluaran)}{In(pengeluaran maks) - (In pengeluaran maks)}$$

Menghitung IPM :

IPM di hitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan pendidikan, dan pengeluaran.

$$IPM = \sqrt[3]{I \text{ kesehatan} \times I \text{ pendidikan} \times I \text{ pengeluaran}} \times 100.$$

(Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur)

Manfaat IPM :

1. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
2. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara.
3. Bagi Indonesia IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU)

(Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur)

2.1.2 Pengeluaran Pemerintah

2.1.2.1 Dasar Teori Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Pemerintah sebagai salah satu bentuk lembaga dalam masyarakat, kegiatannyabertujuan untuk mencapai masyarakat yang aman, adil dan makmur. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut maka pemerintah menggunakan barang dan jasa dengan berbagai bentuknya termasuk didalamnya yang berupa uang. Penggunaan uang untuk melakukan fungsi pemerintah inilah yang dimaksud dengan pengeluaran pemerintah. Menurut Guritno Mangkoesoebroto (2000 : 169) pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila

pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Teori mengenai pengeluaran pemerintah dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Teori Makro, (Guritno Mangkoesobroto, 2000:169).

”Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti misalnya pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut Rostow menyatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya”.

1. Teori Mikro, (Guritno Mangkoesobroto, 2000:177)

1. Tujuan dari teori ekonomi mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang

menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik.

2. Interaksi antara permintaan dan penawaran barang untuk publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut akan menimbulkan permintaan akan barang lain.

Anggaran belanja yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas pemerintah, salah satu aktivitas pemerintah adalah pengeluaran pembangunan dalam berbagai sektor diantaranya sektor pendidikan. Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah direncanakan dalam perumusan anggaran yang akan digunakan dalam pelaksanaan pembangunan, karena anggaran tersebut merupakan variabel yang sangat penting dalam proses pembangunan masyarakat. Alokasi dana pemerintah dalam anggaran (*budget*) yang bertindak sebagai alat pengatur urutan prioritas pembangunan dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai oleh karena itu usaha pembangunan harus selalu berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Trilogi Pembangunan (M. Suparmoko, 1999:49).

Perkembangan pengeluaran pemerintah dapat dijelaskan dengan beberapa faktor dibawah ini:

1. Perubahan permintaan akan barang publik.
2. Perubahan dari aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik, dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi.

3. Perubahan kualitas barang publik.
4. Perubahan harga-harga faktor-faktor produksi.

Melihat perkembangan kegiatan pemerinth dari tahun ke tahun, peranan pemerintah cenderung meningkat. Peningkatan kegiatan pemerintah ini disebabkan oleh adanya beberapa faktor, yaitu:

1. Adanya kenaikan tingkat penghasilan mayarakat, maka kebutuhan masyarakat meningkat. Hal ini mengakibatkan meningkatnya kegiatan pemerintah dalam usaha memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, seperti kebutuhan akan prsarana trasnportasi, pendidikan dan kesehatan umum.
2. Perkembangan penduduk, hal ini membutuhkan peningkatan kegiatan pemerintah untuk mengimbangi perkembangan penduduk dalam memenuhi kebutuhan penduduk trsebut.
3. Perkembangan ekonomi, juga dibutuhkan peranan pemerintah yang sama besar guna mengisi kegiatan ekonomi.

2.1.2.2 Fungsi dan Peranan Pemerintah

Fungsi pemerintah menurut Richad A. Musgrave (dalam buku Guritno Mangkoesoebroto, 2000:2) dibedakan menjadi tiga fungsi dan tujuan kebijakan anggaran belanja Pemerintah, yaitu:

1. Fungsi Alokasi (*Allocation Branch*). Yaitu fungsi untuk menyediakan pemenuhan untuk kebutuhan publik.
2. Fungsi Distribusi (*Distribution Branch*).Yaitu fungsi yang dilandasi dengan mempertimbangkan pengaru sosial ekonomis. Pertimbangan

tentang kekayaan dan distribusi pendapatan, kesempatan memperoleh pendidikan, mobilitas sosial, struktur pasar, macam-ragam warga negara dengan berbagai bakatnya termasuk tugas cabang distribusi tersebut.

3. Fungsi Stabilisasi (*Stabilization Branch*).Yaitu fungsi menyangkut usaha untuk mempertahankan tingkat penggunaan

faktor-faktor produksi yang tinggi dan kestabilan nilai uang. Kaitan dengan permasalahan fungsi atau tujuan diatas hampir selalu dijumpai pada setiap permasalahan mengenai tujuan untuk politik pembangunan, tujuan untuk kebijakan perdagangan, kesempatan kerja, kesempatan memperoleh pendidikan, pertanian, perburuhan, dan lain-lain.

2.1.3 Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

2.1.3.1 Belanja Langsung

Belanja Langsung Menurut permendagri Nomor 13 tahun 2006 belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program-program merupakan penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis

sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan pengeluaran (Output) dalam bentuk barang/jasa.

Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan suatu program atau pengeluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Belanja langsung adalah belanja yang penganggarnya dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan. Karakteristik belanja langsung adalah:

- a) Dianggarkan untuk setiap program atau kegiatan yang diusulkan oleh SKPD.
- b) Jumlah anggaran belanja langsung suatu program atau kegiatan dapat diukur atau dibandingkan secara langsung dengan output program atau kegiatan yang bersangkutan.
- c) Variabilitas jumlah setiap jenis belanja langsung dipengaruhi oleh target kinerja atau tingkat pencapaian yang diharapkan dari program atau kegiatan yang bersangkutan.

Belanja langsung dibagi menurut jenis yang terdiri dari:

- a) Belanja pegawai, digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- b) Belanja barang/jasa, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah berupa belanja habis pakai, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan sebagainya.

- c) Belanja modal, digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

2.1.3.2 Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung Menurut permendagri No 13 Tahun 2006 belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung adalah belanja yang penganggarannya tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya usulan program atau kegiatan. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan setiap bulan dalam satu tahun anggaran sebagai konsekuensi dari kewajiban pemerintah daerah secara periodik kepada pegawai yang bersifat tetap (pembayaran gaji dan tunjangan) dan/atau kewajiban untuk pengeluaran belanja lainnya yang umumnya diperlakukan secara periodik. Karakteristik belanja tidak langsung adalah dianggarkan setiap bulan dalam satu tahun (bukan untuk setiap program atau kegiatan) oleh masing-masing SKPD serta jumlah anggaran belanja tidak langsung sulit diukur atau dibandingkan secara langsung dengan output program atau kegiatan tertentu. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari : Belanja pegawai; Bunga; Subsidi; Hibah; Bantuan Sosial; Belanja bagi Hasil; Bantuan Keuangan; dan Belanja Tidak Terduga.

2.1.4 Pendidikan

2.1.4.1 Definisi Pendidikan

Arti pendidikan sebelumnya mari kita pahami dahulu istilah ilmu pendidikan (paedagogeik) dan pendidikan (paedagogie). Istilah diatas sebetulnya mempunyai makna yang berlainan “ilmu pendidikan” mempunyai makna yang sama dengan istilah (paedagogeik), sedangkan “pendidikan” sama dengan istilah (paedagogie).

1. Ilmu Pendidikan

Ilmu pendidikan lebih menitik beratkan kepada pemikiran permenungan tentang pendidikan. Pemikiran bagaimana sebaiknya sistem pendidikan, tujuan pendidikan materi pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, cara penilaian, cara penerimaan siswa, guru yang bagaimana, jadi di sini lebih menitik beratkan teori.

2. Pendidikan

Hal ini lebih menekankan dalam hal praktek, yaitu menyagkut kegiatan belajar mengajar. Tetapi keduanya ini tidak dapat dipisahkan secara jelas. Keduanya harus dilaksanakan secara berdampingan, saling memperkuat peningkatan mutu dan tujuan pendidikan.

Selanjutnya dalam diktat ini banyak menggunakan istilah pendidikan/ paedagogie dan mendidik, yang lebih menekankan prakteknya.

Secara garis besar pendidikan dapat diartikan dengan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Pendidikan Nasional Indonesia adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. (Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Berdasarkan Pasal 3 UU RI Nomor 20/ tahun 2003, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan digolongkan menjadi tiga yaitu pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal. Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang terorganisir dalam wadah yang dinamakan sekolah. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, dimana wadah pendidikan tersebut melalui lembaga pelatihan dan keterampilan ataupun kursus. Sedangkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan yang terjadi di lingkungan keluarga yang berlangsung secara alamiah dan wajar. Salah satu jalur pendidikan formal adalah pendidikan menengah yang merupakan lanjutan dari pendidikan dasar dengan lama pendidikan tiga tahun, terdiri atas pendidikan

menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan, yang berbentuk Sekolah Menengah Umum (SMU), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

2.1.5 Pengeluaran dan Pembiayaan Sektor Pendidikan

2.1.5.1 Sumber-Sumber Pembiayaan Sektor Pendidikan

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan dapat bersumber dari :

1. Pemerintah Daerah.

Dana pendidikan selain gaji dan biaya pendidikan kedisiplinan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 4 yang menyatakan bahwa pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

1. Dana Masyarakat.

Termasuk dana dari orangtua atau masyarakat atau dunia usaha maka diupayakan untuk membiayai kegiatan peningkatan mutu melalui program pengayaan dan program khusus yang disepakati orangtua.

2. Sumber lain.

Misalnya hibah, pinjaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2 Hubungan Antara Variabel

Terdapat tiga variabel yang di hubungkan, dalam penelitian ini variabel yang di maksud adalah Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, dan Indeks Pembangunan Manusia Sektor Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan menggunakan indikator Pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Sektor Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Sektor Pendidikan

Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Pengeluaran pembangunan pada sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata. Anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN merupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan (Wahid, 2012).

Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa. Suatu bangsa harus

meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai pembangunan (Meier, dalam Winarti, 2014: 41).

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No	Nama Pengarang dan Tahun	Judul Penelitian	Alat Penelitian	Hasil Penelitian
1	Septiana M. M. Sanggelorang, Vekie A. Rumat, dan Hanly F.DJ. Siwu (2015)	Pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor Pendidikan dan kesehatan terhadap indeks Pembangunan manusia Di sulawesi utara	Spss 21 Analisis regresi Linear berganda.	Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh positif, yaitu meningkat sebesar 0,870 dan secara statistik signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Dan variabel pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh negatif, yaitu sebesar - 0,438 dan secara statistik tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Sulawesi Utara.
2	Felixs Farel Maga, Krest D. Tolosang dan Agnes L.Ch. Lapien (2016)	Pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap perekonomian di kabupaten sorong selatan	Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil analisis menunjukan bahwa belanja langsung tidak berpengaruh terhadap Perekonomian Kabupaten Sorong Selatan. Belanja tidak langsung tidak berpengaruh terhadap Perekonomian di Kabupaten Sorong selatan. Secara bersama-sama atau simultan belanja langsung dan belanja tidak langsung tidak berpengaruh terhadap Perekonomian Kabupaten Sorong Selatan.

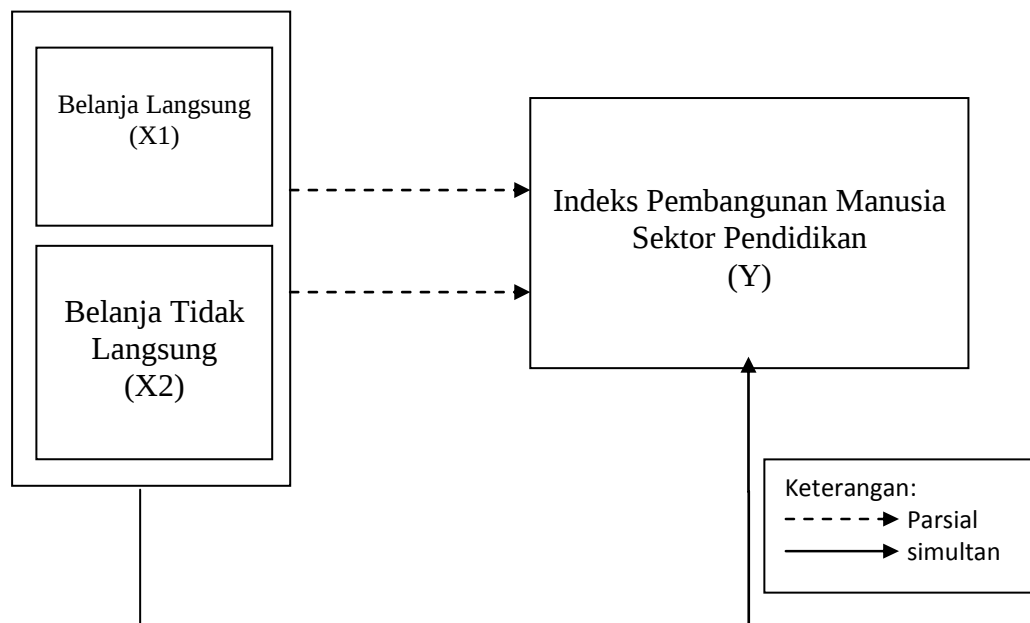
				Besarnya proporsi belanja langsung terhadap total belanja adalah sebesar rata-rata 4,853% sedangkan proporsi belanja tidak langsung terhadap total belanja adalah rata-rata 0,010% pertahun.
3	Aviyanti dan Susilo (2016)	Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur	Regresi Linear Berganda	Belanja Pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan selama periode 2007-2012 telah menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan untuk belanja pemerintah bidang infrastruktur menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan, pertumbuhan penduduk sebagai variable control menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan.
4	Jouzar Farouq Ishak (2017)	Pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Kemiskinan	Analisis Regresi	Pengeluaran langsung berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, namun belanja tidak langsung berdampak positif terhadap kemiskinan.
5	Ana Mei Rafika (2017)	Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Se-Indonesia	Uji Asumsi Klasik dan Pengujian Hipotesis dengan Metode Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah menurut fungsi kesehatan, realisasi belanja daerah menurut ekonomi atas dasar harga konstan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

2.4 Kerangka Pikiran Teoritis

Dalam penelitian ini akan dianalisis mengenai Pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Sektor Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Sektor Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemerintah tidak cukup hanya mencapai tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan belanjanya. Tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati kebijaksanaan tersebut. Memperbesar pertumbuhan jumlah anggaran belanja dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah tidak memadai. Melainkan harus diperhitungkan siapa yang akan terpekerjakan atau meningkat pendapatannya. Dalam penelitian ini, variabel-variabel yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia khususnya di Sektor Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah besarnya pertumbuhan jumlah anggaran belanja pemerintah yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Sektor Pendidikan karena faktor-faktor ini merupakan faktor yang diyakini berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya pada Sektor Pendidikan yang di lihat dari angka Persentase rata-rata lamanya sekolah.

Skema itu dapat dilihat seperti paada gambar dibawah ini:

Gambar 2.1 Kerangka Pikiran Teoritis



2.5 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini di duga:

- 2.5.1 Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung berpengaruh Simultan secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Sektor Pendidikan di Provinsi NTT.
- 2.5.2 Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung berpengaruh Parsial, secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Sektor Pendidikan di Provinsi NTT.